

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR AKUNTANSI DAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN

Muhammad Hasyim Ashari dan Theo Eko Prasetyo

*Program Studi Akuntansi, STIE INDOCAKTI, Malang
e-mail :indocaktistieyahoo.com*

ABSTRAK, Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah, untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan memiliki paparan prosedur operasional standar akuntansi dan anggaran yang dapat di pahami dengan mudah oleh seluruh seluruh kalangan karyawan, baik karyawan lama, terlebih terhadap karyawan baru pada khususnya dan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga karyawan maupun masyarakat umum mampu dan dapat menjalankan kebijakan pemerintah hanya dengan membaca prosedur operasional standar.

Metode penelitian dan pengembangan kali ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), sehingga prosedur penelitian dan pengembangan secara berurutan meliputi: pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi ahli, revisi, dan produk akhir. Subjek coba yang digunakan untuk validasi menggunakan validasi praktisi dan akademisi, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumen terkait, observasi, dan literatur pendukung. Perhitungan hasil validasi untuk mendapatkan aspek nilai masuk dalam kualifikasi, dilakukan dengan menggunakan rata-rata. Sehingga produk yang dikembangkan akan menunjukkan produk dengan kualifikasi sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi.

Kata Kunci : Penelitian dan Pengembangan, Prosedur Operasional Standar Akuntansi, dan Anggaran.

PENDAHULUAN

Dengan adanya standar akuntansi, kegiatan akuntansi dan anggaran akan lebih terarah dan tertata sehingga lebih mudah dalam menghasilkan laporan anggaran. Sedangkan jika tidak adanya standar akuntansi dan anggaran, sebuah instansi akan tetap melakukan kegiatan akuntansi dan anggaran dalam kesehariannya, namun proses dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dan anggaran tersebut tidak adanya keselarasan antara satu karyawan dengan karyawan lain.

Prosedur yang ada merupakan produk buatan pemerintah pusat yang berarti isi dari prosedur tersebut menggunakan bahasa pemerintahan, sedangkan tidak semua masyarakat bekerja pada dinas pemerintahan. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat yang

membaca prosedur mampu memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan yang ada didalamnya.

Dari permasalahan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan dalam kantor dinas pemerintahan. Yang nantinya diharapkan akan membantu dalam mengatasi penggunaan bahasa dalam prosedur operasional standar. Sehingga menjadikan standar operasional prosedur yang mudah dimengerti dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini akan membantu kinerja dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan akuntansi dan anggaran, sehingga menghasilkan laporan anggaran yang tepat pada waktunya.

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah, untuk membantu

instansi memiliki paparan prosedur operasional standar akuntansi dan anggaran yang dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh seluruh kalangan karyawan baik karyawan lama terlebih terhadap karyawan baru pada khususnya dan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan akan membantu kerja karyawan dalam menjalankan kegiatan akuntansi dan anggaran.

Dengan adanya prosedur baru ini, diharapkan karyawan, baik yang menjadi karyawan tetap maupun karyawan baru akan dengan mudah membaca dan memahami prosedur baru ini, sehingga karyawan akan lebih cepat dalam melakukan kegiatan akuntansi dan laporan anggaran dengan menggunakan prosedur baru ini, terlebih jika mendapat izin untuk diterapkan secara langsung dalam melakukan tugas-tugas dan melakukan kegiatan akuntansi dan anggaran. Penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu memberikan sebuah prosedur akuntansi yang baik dan tertata untuk pengembangan akuntansi keuangan dan kantor-kantor dinas lainnya.

Serta dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menyusun sistem akuntansi agar dapat membantu memberikan pengetahuan prosedur penyusunan sistem yang berkaitan dengan keuangan dari mulai transaksi, proses transaksi hingga penyusunan laporan yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bagi penulis, penelitian dan pengembangan ini bermanfaat sebagai dasar dalam meningkatkan keterampilan membaca secara efektif, karena sebelum menuangkan hasil penelitian dalam tulisan, peneliti harus membaca literatur yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian yang hendak dibahas. Bagi pembaca, penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan akuntansi dan anggaran dalam suatu dinas pemerintahan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang sejenis. Peneliti

hanya dibatasi dengan melakukan penelitian dalam hal bidang akuntansi dan anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan. Sehingga tidak mencakup bidang lain yang keluar dari batasan penelitian dan analisis.

Asumsi pengembangan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan adalah struktur organisasi dan tugas wewenang, bidang akuntansi dan pelaporan anggaran. Namun adapun batasan lain yang diberikan ialah menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang telah menjadi dasar aturan akuntansi dalam lingkungan dinas pemerintahan.

Keterbatasan atas pengembangan produk yang dihasilkan peneliti hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, namun tidak mencantumkan penggunaan alat yang dibutuhkan. Hal itulah yang menjadikan hasil penelitian dan pengembangan masih perlu dilakukan pengembangan oleh peneliti selanjutnya pada khususnya dan oleh pemerintah daerah pada umumnya.

Definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan produk adalah:

Penelitian dan pengembangan

Definisi dari penelitian dan pengembangan merupakan suatu tindakan menyelidiki (analisis) suatu masalah dalam sebuah produk dalam kondisi tertentu yang akan dikembangkan menjadi suatu produk baru yang lebih baik dalam beberapa hal.

Prosedur operasional standar

Definisi dari prosedur operasional standar merupakan serangkaian instruksi yang telah disusun secara rapi dan harus diikuti oleh seluruh unit karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya selama berada pada lingkungan kantor atau perusahaan.

Akuntansi

Definisi dari akuntansi merupakan kegiatan melaksanakan pencatatan transaksi keuangan beserta kejadian-kejadian yang timbul setelah

transaksi keuangan berlangsung dalam periode yang telah ditetapkan oleh unit kerja.

Anggaran

Definisi anggaran merupakan hasil dari proses perancangan dan perencanaan dari sebuah tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dan Pengembangan

Menurut Cholid dan Abu Ahmadi (2012:44), penelitian dan pengembangan merupakan suatu usaha mengembangkan produk dengan cara menyelidiki dan membuat perubahan. Menurut Borg & Gall (1983:772), penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan megesahkan produk bidang pendidikan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu tindakan menyelidiki (analisis) suatu hal dalam kondisi tertentu yang akan dikebangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah penelitian dan pengembangan bagi perusahaan yang ingin berkembang maupun pada dinas pemerintah, dengan tujuan mempermudah pelaksanaan akuntansi dan anggaran serta mempercepat pelaksanaan kegiatan akuntansi.

Menurut Jogyanto (2010:32) menyebutkan tujuan dari melakukan penelitian adalah untuk tercapainya melakukan penelitian. Secara umum tujuan dari penelitian adalah untuk mencapai sasaran dari isu penelitian. Dengan demikian tujuan dari penelitian seharusnya mengacu pada isunya, yaitu untuk mencapai sasaran untuk memecahkan masalah, menangkap peluang, membuktikan fenomena, dan menemukan teori yang baru.

Model Penelitian dan Pengembangan

Model penelitian dan pengembangan yang diutarakan Borg & Gall (1983:3) meliputi penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdapat dua tujuan utama yaitu: 1). Pengembangan produk, dan 2). Menguji

keefektifan produk yang dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall (1983:775) meliputi: penelitian dan pengumpulan informasi, merencanakan, pengembangan produk awal, melakukan uji coba lapangan, perbaikan atau revisi produk awal, uji coba produk utama, revisi produk utama, revisi produk akhir, dan sosialisasi beserta penerapan produk.

Sedangkan menurut Nusa Putra (2013:69) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan terdiri dari empat jenis kegiatan, yaitu: penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan produk, dan proses pengembangan. Penelitian dasar adalah karya eksperimen asli tanpa tujuan komersil tertentu. Penelitian terapan adalah penelitian yang sering digunakan universitas yang merupakan karya eksperimen asli dengan tujuan spesifik. Pengembangan produk merupakan peningkatan dan perluasan produk yang telah ada. Proses pengembangan adalah menciptakan proses baru yang ingin ditingkatkan.

Prosedur Operasional Standar

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Prosedur Operasional Standar (POS) atau dalam Bahasa Inggris "*Standart Operational Procedure (SOP)*" merupakan serangkaian instruksi atau acuan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi yang telah disusun yang harus diikuti oleh seluruh unit untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010, pedoman POS dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi

di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi prosedur operasional standar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pedoman ini bertujuan untuk: a). Membantu setiap unit organisasi yang terkecil agar memiliki prosedur operasional standar; b). Menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah; c). Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan, d). Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24:2005). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Proses Persiapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Proses penyiapan standar akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh komite. Proses penyiapan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan ini adalah proses yang berlaku secara umum internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan

pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

Laporan anggaran merupakan suatu laporan yang memberikan ikhtisar keuangan suatu instansi pemerintah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan dari penyusunan standar akuntansi pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 (2005.1) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan anggaran pemerintah melalui pengembangan dan penyusunan laporan anggaran dalam instansi pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjadi informasi para pengguna untuk penyusunan laporan dalam perusahaan atau instansi nonpemerintahan, juga agar masyarakat turut serta menjadi peran penting terbentuknya pemerintahan yang adil serta dapat memberikan motivasi meningkatkan kinerja yang lebih baik. Laporan anggaran pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi tujuan khusus pemakainya.

Akuntansi

Akuntansi merupakan pencatatan transaksi keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, akuntansi merupakan seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan menurut Mulyadi (1981:12) memaparkan bahwa:

“Akuntansi yaitu seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dalam transaksi keuangan dengan cara yang tepat dan menggunakan penunjuk atau dalam bentuk uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari transaksi keuangan sehingga

dapat dijadikan laporan keuangan sebagai hasilnya. Sedangkan seseorang yang melakukan kegiatan yang bersifat akuntansi biasa kita sebut akuntan.”

Anggaran

Menurut Cecilya dan Kinney (2011,406) menjelaskan bahwa proses dari rencana-rencana dan menerjemahkan narasi kualitatif kedalam sebuah dokumentasi dengan bentuk kuantitatif disebut dengan penganggaran, sedangkan hasil akhir dari proses tersebut adalah anggaran.

Jadi, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan dari sebuah tindakan yang mengacu pada hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Dari pengertian anggaran diatas usaha-usaha kantor/perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diperoleh dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Kantor/perusahaan yang selalu memandang kedepan akan senantiasa memikirkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari, sehingga jika terjadi sesuatu hal takut terduga maka kantor/perusahaan telas siap dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Metode Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengembangkan suatu sistem perlu adanya persiapan serta perencanaan yang matang. Metode penelitian kali ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan (*Research and Development*). Rangkaian tahap penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall (1983:775) meliputi: *Research and information collecting* (penelitian dan pengumpulan informasi), *Planning* (merencanakan), *Develop preliminary form of product* (pengembangan produk awal), *Preliminary field testing* (melakukan uji coba lapangan). *Main product revision* (perbaikan/revisi produk awal), *Main field testing* (uji coba produk utama), *Operational product revision* (revisi produk utama), *Final product revision* (revisi produk akhir), dan *Dissemination and implementation*

(mendesimilasikan dan mengimplementasikan produk).

Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Prosedur penelitian dan pengembangan merupakan langkah-langkah yang diambil peneliti untuk mengembangkan produk, dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah POS Akuntansi dan POS Anggaran. Prosedur penelitian dan pengembangan secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses yang dilalui dalam pengembangan produk. Prosedur yang diambil peneliti memiliki enam langkah, yaitu: (1) Pengumpulan Informasi, (2) Perencanaan, (3) Pengembangan Produk Awal, (4) Validasi Ahli, (5) Revisi (bila diperlukan), dan (6) Produk Akhir.

Uji Validasi Produk

Dalam tahap uji validasi produk dilakukan dengan cara, uji validasi praktisi dan uji validasi akademisi. Dari uji validasi praktisi oleh pihak terkait pelaksana kegiatan akuntansi dan anggaran. Selanjutnya produk yang telah siap akan diujikan pada akademisi. Kegiatan dari peneliti bertujuan agar menghasilkan produk yang lebih baik dari sebelumnya dan akan siap diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi dan anggaran.

Desain Uji Validasi

Desain uji coba kali ini menggunakan Metode Skala Likert, skala likert menurut Djaali (2008:28) ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif.

Uji Validasi Praktisi

Pada tahap uji validasi pertama, dilakukan oleh staff ahli pada bidang akuntansi dan pelaporan anggaran. Pada tahap ini, dikemukakan bagaimana sistem akan berjalan berdasarkan urut-urutannya. Staff ahli akan mengkoreksi sistem apakah layak atau masih

perlu penyempurnaan, dengan menggunakan angket yang telah disiapkan.

Revisi

Pada tahap ini, produk dari validasi ahli mendapat beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Setelah pengambilan produk yang mengalami beberapa kesalahan, peneliti mendapat beberapa masukan dari validasi ahli untuk melakukan revisi produk. Setelah produk selesai pada tahap revisi dengan memasukkan beberapa masukan, produk siap untuk proses ke tahap selanjutnya.

Uji Validasi Akademisi

Pada uji validasi tahap ini peneliti telah siap melakukan uji validasi akademisi dari produk yang telah direvisi sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan menggunakan angket. Apabila pada tahap ini sistem telah memenuhi standar dan dapat digunakan, maka sistem ini dapat diterapkan. Hasil data yang diperoleh dari uji coba tahap kedua ini diperoleh dan diujikan untuk penyempurnaan pengembangan prosedur akuntansi dan anggaran.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Setelah metode ditetapkan dan dilakukan maka pengumpulan data sesuai kebutuhan metode studi yang dilakukan. Pengumpulan data primer adalah wawancara dengan nara sumber, yang menghasilkan transkrip wawancara. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan adalah :

Data primer juga disebut data asli, dalam hal ini metode perolehan data primer dengan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya, sehingga peneliti hanya mengambil mengumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam hal ini perolehan data sekunder dengan metode observasi, dokumentasi dan literatur.

Instrumen Pengumpulan Data

- a. Data umum perusahaan, meliputi struktur organisasi perusahaan dan struktur laporan arus kas umum.
- b. Data Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 beserta lembar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005.
- c. Data Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005.

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber subjek dari mana data diperoleh. Penentuan sumber data ditetapkan menjadi 4 (tiga) macam metode yaitu; (1) Metode *person* (wawancara). (2) Metode *paper* (dokumen terkait). (3) Metode *place* (lokasi observasi), dan (4) *literature* (daftar bacaan).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan metode Skala Likert. Penelitian ini dibantu dengan menggunakan angket uji coba kepada validator, dimana isi angket tersebut merupakan susunan dari prosedur operasional standar akuntansi dan anggaran. Angket tersebut berperan sebagai penilaian yang dilakukan untuk menunjukkan penilaian terhadap prosedur dengan melihat dari 4 (empat) aspek yaitu: kegunaan, kemudahan, kelengkapan, dan keterbacaan.

Skala likert tersebut mempunyai peran dalam mengukur “ kesetujuan dan ketidaksetujuan “ seorang terhadap pernyataan yang kita ajukan. Biasanya dalam skala liker terdapat jenjang penilaian sebagai berikut:

- (1) Sangat Rendah,
- (2) Rendah,
- (3) Cukup,
- (4) Tinggi,
- (5) Sangat Tinggi.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode rata-rata yang dikemukakan oleh Anto Dajan (2000:112) menyatakan bahwa dalam beberapa hal menganggap bahwa nilai rata-rata dapat merupakan nilai yang cukup mewakili bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan.

Penghitungan dari hasil angket validasi dengan menggunakan bantuan program Microsoft Office: Excel. Hasil angket tersebut akan dihitung nilai rata-rata per prosedur dengan bantuan rumus yang telah diutarakan oleh Syofian Siregar (2013:137) sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan :

\bar{X} = Nilai Rata-Rata

$\sum X_i$ = Jumlah Data

n = Banyak Data

Dari hasil perhitungan rata-rata, akan diketahui kualifikasi produk yang telah dibuat. Prosedur menentukan kualifikasi produk dengan menggunakan distribusi frekuensi yang telah diungkapkan oleh Anto Dajan (2000:83) dengan menentukan jumlah kelas umumnya tergantung pada pertimbangan-pertimbangan praktis yang masuk akal dari pengolah data sendiri. Sehingga menghasilkan rumus menentukan distribusi frekuensi sebagai berikut:

$J = (\text{Nilai data tertinggi}) - (\text{Nilai data terendah})$

$K = 1 + 3,322 \log n$

$I = \frac{J}{K}$

Keterangan :

J = Jangkauan

K = Jumlah Kelas

I = Interval atau *range*

Dengan menggunakan rumusan diatas maka dapat dibentuk interval kelas dengan kualifikasi sebagai berikut:

1 – 1,99 kualifikasi sangat rendah

2 – 2,99 kualifikasi rendah

3 – 3,99 kualifikasi cukup

4 – 4,99 kualifikasi tinggi

5 – 5,99 kualifikasi sangat tinggi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Sejarah Perusahaan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan suatu badan dinas yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset didirikan pada tanggal 04 Juni 2008 menurut Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2008. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pelaksanaan kewenangan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dan strategi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Lokasi

Lokasi merupakan tempat atau dengan kata lain letak suatu alamat tempat tertentu. Lokasi suatu kantor dinas pemerintahan seharusnya berada di tengah kota atau dapat dengan mudah diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan berada tepat di pusat Kota Lamongan. Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan berada di Jalan Basuki Rahmat No. 2, serta dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara : Alon-alon Kabupaten Lamongan.
- 2) Sebelah Selatan : Jalan Sunan Drajat.
- 3) Sebelah Timur : Jalan Lamongrejo.
- 4) Sebelah Barat : Jalan K.H Hashim Anshyari.

Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan memiliki visi:

“Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2013 di Indonesia”.

Sedangkan misi-misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah.
- d. Pengelolaan Akuntansi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi. Pengelolaan akuntansi daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- e. Pengelolaan Anggaran

Sebuah perencanaan anggaran pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah rencana untuk pendapatan dan pengeluaran kegiatan akuntansi dimasa yang akan datang sebagai panduan untuk menyalurkan dana dan pembelanjaan.

Analisis Data

Dari paparan data yang telah dikumpulkan peneliti, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah memiliki

standar akuntansi namun masih perlu adanya perbaikan untuk digunakan dalam kegiatan akuntansi. Peneliti akan mengembangkan sistem akuntansi dan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS).

Kesimpulan

- a. Kesimpulan dari hasil perhitungan nilai angket dengan rumus rata-rata Prosedur Operasional Standar Akuntansi: Nilai dari perhitungan rata-rata antara validasi praktisi dan akademisi terhadap Prosedur Operasional Standar Akuntansi menunjukkan nilai 4,18 masuk dalam kualifikasi tinggi. Sehingga, Prosedur Operasional Standar Akuntansi memenuhi kualifikasi layak untuk diterapkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan.
- b. Kesimpulan dari hasil perhitungan nilai angket dengan rumus rata-rata Prosedur Operasional Standar Anggaran: Nilai dari perhitungan rata-rata antara validasi praktisi dan akademisi terhadap Prosedur Operasional Standar Anggaran menunjukkan nilai 4,17 masuk dalam kualifikasi tinggi. Sehingga, Prosedur Operasional Standar Akuntansi memenuhi kualifikasi layak untuk diterapkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan.

Produk Akhir

Berdasarkan perhitungan dari uji validasi praktisi dan validasi ahli, menunjukkan kesimpulan bahwa, Prosedur Operasional Standar yang diperoleh dari pengembangan penelitian mulai awal sampai akhir, telah mendapat kualifikasi layak diterapkan dan baik, dengan melakukan sekali revisi. Produk akhir dari penelitian ini menghasilkan 43 POS yang terdiri dari 17 POS Akuntansi dan 26 POS Anggaran. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Prosedur Operasional Standar Akuntansi dan Anggaran telah siap diterapkan pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan.

KAJIAN DAN SARAN

Kajian Produk

Produk Prosedur Operasional Standar Akuntansi dan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan, merupakan produk hasil dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bagian akuntansi dan anggaran. Pengembangan produk ini bermula dari penelitian dengan melihat kondisi dan masalah yang ada. Dengan melakukan wawancara sebagai awal dari melakukan penelitian. Peneliti mendapat informasi tentang masalah yang terdapat didalamnya. Setelah beberapa masalah ditemui, peneliti melakukan observasi terhadap keadaan yang terjadi. Melihat dari masalah yang ada, pengambilan beberapa materi rujukan diambil dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Sehingga menghasilkan Prosedur Operasional Standar Akuntansi dan Anggaran.

Prosedur Operasional Standar Akuntansi dan Anggaran dibuat dari masalah yang dipaparkan narasumber. Dengan melihat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari tempat observasi, dijabarkan satu demi satu POS-POS Akuntansi dan Anggaran. Dengan cara ini, maka penyusunan kembali POS-POS Akuntansi dan Anggaran dibantu dengan beberapa literatur, dapat menghasilkan Prosedur Operasional Standar Akuntansi dan Anggaran yang lebih baik. Sehingga dalam POS yang baru ini, akan lebih mudah dibaca oleh seluruh kalangan karyawan terutama karyawan baru yang masih belum mengerti tugas-tugas apa yang nantinya ia kerjakan.

Saran Pemanfaatan Produk Lebih Lanjut

Dari hasil penelitian dan pengembangan produk menunjukkan bahwa produk ini layak diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan. Meskipun begitu produk ini telah terbukti cukup baik sebagai alternatif pemecahan

masalah dalam kegiatan akuntansi dan anggaran keuangan, tetapi pengembang memberikan saran dalam pemanfaatan produk ini yaitu:

- a. Produk ini dapat digunakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam penerapan dan penyusunan informasi akuntansi serta penerapan prosedur kerja pada karyawan
- b. Bagi pembaca, penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan akuntansi dan anggaran dalam suatu dinas pemerintahan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang sejenis. Sehingga diharapkan bahwa penelitian selanjutnya dapat menghasilkan pengembangan penelitian yang lebih baik

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Jakarta. Rineka Cipta.
- Borg, W.R and Gall, M.D. 1983 *Education Research and Development*. New York. Longman.Inc.
- Dajan, Anto. 2000. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid 1. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Djali dan Pudji. 2008. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta. Grasindo.
- Jogiyanto, H.M. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFY-Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. kbbi.web.id/ diakses tanggal 10 Desember 2012.
- Mulyadi. 1981. *Akuntansi Biaya*. Jogjakarta: BPFY Universitas Gajah Mada.

- Munawir.S. 1992. *Analisa Laporan Keuangan*. Jogjakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16. *Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administratif di Lingkungan Pemerintahan*. Bandung.
- Putra, Nusa. 2013. *Rescearch & Development, Penelitian dan Pengembangan Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Raiborn, Cecilya and Michael R. Kinney. 2011. *Akuntansi Biaya Dasar dan Perkembangan*. Edisi 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Santyasa, I Wayan. 2009. *Metode Penelitian, Pengembangan, dan Teori Pengembangan Modul*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suprayogo, Imam dan Topbroni. 2003. *Methodologi Penelitian Sosial Agama*. (Cet. XII; Bandung : Remaja Rosdakarya).